

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	T4	21-8-2002

## Pemerintah berupaya cegah investor tambang hengkang

JAKARTA (Bisnis): Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya untuk menahan larinya investor asing maupun lokal di sektor tambang yang terganjal peraturan dengan melakukan pendekatan ke para pihak terkait seperti dengan Departemen Keuangan.

Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Wimpy S. Tjetjep menuturkan pemerintah dalam hal ini Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral melakukan pendekatan dengan cara mengirimkan surat ke Departemen Keuangan untuk menjelaskan masalah yang dihadapi pengusaha tambang.

Sebelumnya sekitar 33 pengusaha tambang mengundurkan diri dan menghentikan kegiatan operasinya karena terganjal peraturan

seperti PP No 144/2000 tentang perubahan status batu bara dari barang kena pajak menjadi barang bukan kena pajak (*Bisnis*, 20 Agustus)

"Penjelasan kepada Menteri dititikberatkan pada masalah peraturan yang memberatkan pengusaha tambang," tuturnya di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan dari 33 perusahaan tambang tidak semuanya mengundurkan diri. Dia mengakui memang ada kendala tumpang tindih peraturan seperti hambatan PPN dan tumpang tindih lahan di hutan lindung.

Namun demikian, lanjutnya, ada masalah lain yang perlu diketahui sebagai penyebab mundurnya investor pertambangan yakni prospek kalori dari mineral yang ditambang tidak bagus.

Wimpy mengatakan untuk perusahaan yang sedang dalam tahap terminasi bukan saja karena izinnya sudah habis, tapi lebih karena prospek kalori yang rendah. "Karena dianggap tidak mempunyai prospek itulah maka investor mengundurkan diri."

### Investor baru

Namun demikian, katanya, pemerintah tetap memberikan izin kepada investor lain jika berminat untuk mengelola lahan yang ditinggalkan tersebut.

"Kami tidak akan menghalangi seandainya ada investor baru yang berminat mengelola lahan itu."

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, pernah mengatakan saat ini tim kecil yang dibentuk untuk menyelesaikan

masalah tumpang tindih lahan di hutan lindung tengah membahas kelangsungan kegiatan tambang yang saat ini berhenti di areal itu.

"Tim tersebut nantinya diharapkan segera mengeluarkan keputusan apakah pengusaha [tambang] dapat meneruskan usahanya atau tidak," tuturnya.

Sebelumnya dalam rapat gabungan yang membahas tumpang tindih lahan di hutan lindung diputuskan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dibentuk tim kecil.

Tim tersebut yang akan memutuskan apakah perusahaan tambang yang mempunyai izin melakukan penambangan di lokasi hutan lindung dapat meneruskan kegiatannya atau tidak. (04)